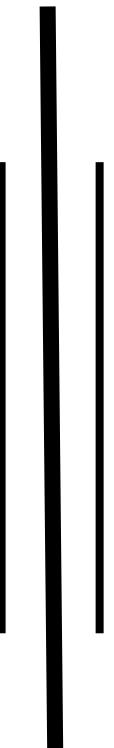


**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAHAN (LKjIP)
SEMESTER I
TAHUN 2025**



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK KOTA BANDA ACEH**



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK

JI. ABU LAM U NO 7 BANDA ACEH (KOMPLEK BALAI KOTA), Telp/Fax.- KODE POS 23242

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH

NOMOR: 065 /320.1/ SK /2025

TENTANG
PENETAPAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH SEMESTER I TAHUN 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa dengan adanya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, dan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh sebagai salah satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - c. bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - d. bahwa berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Banda Aceh Nomor 065/01312/2025 Tentang Teknis Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Banda Aceh dan OPD tahun 2025 Serta Pemenuhan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Banda Aceh dan OPD Tahun 2026;
 - e. bahwa sehubungan dengan huruf a,b,c, dan d maka perlu ditetapkan Keputusan mengenai Penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Semester I Tahun 2025.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Banda Aceh 2007-2027;
11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
12. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh;
13. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Semester I Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tujuan Penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Semester I Tahun 2025 adalah untuk memperoleh informasi pencapaian kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja serta peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 16 Juni 2025 M

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA
DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH**



**Alizar, S.Ag.,M.Hum
Pembina Utama Muda /
NIP. 19691117 200112 1 002**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T dengan rahmat dan hidayah-Nya, Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh Semester I tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen LKjIP ini disusun dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di lingkungan Diskominfotik Kota Banda Aceh dan untuk memenuhi ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan visi, misi, tujuan, sasaran strategis serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Diskominfotik melalui pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan serta sub kegiatan yang telah tercantum di dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Diskominfotik Tahun 2023-2026. Selain itu penyusunan LKjIP ini juga berpedoman dan mengacu pada Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Tahun 2025.

Akhirnya Dokumen LKjIP Diskominfotik Kota Banda Aceh Semester I Tahun 2025 di dalam pengjerjaannya serta penyajiannya telah diupayakan untuk diselesaikan dengan sebaik mungkin walaupun dengan berbagai kekurangan dan keterbatasan yang dihadapi. Dokumen LKjIP ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak sebagai bahan pertanggungjawaban di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Diskominfotik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Aspek Strategis Organisasi.....	2
1.4. Gambaran Umum	3
1.5. Sistematika Penulisan	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1. Rencana Strategis	10
2.2. Tujuan dan Sasaran	11
2.2.1.Tujuan	11
2.2.2.Sasaran	12
2.3. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran.....	14
2.4. Rencana Kinerja.....	16
2.5. Perjanjian Kinerja	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	20
3.1.1..Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025 dengan Renstra 2023-2026.....	21
3.1.2..Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja, Kendala dan Alternatif Solusi/ Upaya	24
3.1.3..Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya/Anggaran Terhadap Program Diskominfotik	31
3.1.4..Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya	36
3.2. Realisasi Anggaran	39

3.2.1..Capaian Diskominfotik Sepanjang Tahun 2024	42
3.2.2..Strategi/Langkah/Kebijakan Upaya Perbaikan Kinerja	43
BAB IV PENUTUP	45

LAMPIRAN

Ikhtisar Eksekutif

Dengan memanajatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT, dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh Semester I Tahun 2025 telah selesai disusun dalam rangka mewujudkan *Good Governance* di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dan untuk memenuhi ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan juga sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap Rencana Strategis Diskominfotik Tahun 2023-2026, Rencana Kerja dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Diskominfotik Kota Banda Aceh selaku salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh wajib melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang bersifat hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) penting dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja. LKjIP ini diharapkan dapat memberikan kesimpulan tentang pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (*tupoksi*) serta dapat dipergunakan sebagai titik tolak dan bahan analisis dalam rangka meningkatkan kinerja Diskominfotik Kota Banda Aceh di tahun-tahun berikutnya.

Dokumen LKjIP menguraikan pencapaian kinerja yang tertuang di dalam pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan tupoksi Diskominfotik Kota Banda Aceh dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis secara menyeluruh yang telah dilaksanakan pada Semester I tahun 2025 serta beberapa hal dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis, baik kendala dan hambatan maupun strategi pemecahan masalahnya.

Simpulan LKjIP Diskominfotik Semester I Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Diskominfotik yang ditetapkan pada Tahun 2025 sebanyak 1 tujuan, 2 sasaran strategis dengan 3 Indikator Kinerja Utama;
2. Pencapaian sasaran strategis tersebut direncanakan akan dicapai dengan pelaksanaan 5 program, 12 kegiatan dan 36 sub kegiatan, dimana pada pelaksanaanya terjadi pergeseran skala prioritas dan anggaran yang diberikan sehingga program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan berkurang menjadi 5 program, 10 kegiatan dan 21 sub kegiatan;
3. Dalam pencapaian 2 sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilakukan pergeseran skala prioritas dan anggaran yang diberikan dapat terlaksana dengan baik;
4. Dana yang digunakan untuk pencapaian sasaran strategis tersebut bersumber dari APBK Kota Banda Aceh dengan anggaran yang dialokasikan kepada Diskominfotik Kota Banda Aceh adalah sebesar Rp 22.232.387.455,- dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp 6.524.026.425, atau dengan presentase 29,34%;
5. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Diskominfotik Kota Banda Aceh pada semester I tahun 2025 menghadapi beberapa kendala yang dapat diatasi melalui berbagai strategi pemecahan masalah yang telah ditetapkan, dan
6. Secara umum kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh dalam pencapaian sasaran strategis telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan meskipun banyak permasalahan dan hambatan yang dialami.

Dokumen LKjIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Semester I Tahun 2025 ini merupakan hasil penilaian yang obyektif terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sumber daya yang ada sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Dokumen Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Penyusunan LKjIP ini memerlukan kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sebagai bahan penyempurnaan LKjIP Diskominfotik dimasa yang akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh dan Menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang diperkuat dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Banda Aceh. Diskominfotik Kota Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota Banda Aceh.

Dalam rangka terselenggaranya sistem pemerintahan (*good governance*) Kota Banda Aceh yang baik diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Salah satu media untuk mewujudkan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan *good governance* ini adalah dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP Diskominfotik adalah media atau dokumen akuntabilitas kinerja yang dipakai oleh Diskominfotik untuk memberikan laporan pertanggungjawaban di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan juga sebagai dokumen pertanggungjawaban Diskominfotik kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) tentang pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Diskominfotik Tahun 2023-2026 dimana Renstra ini merupakan hasil perumusan dari rangkaian proses sistematis dan berkelanjutan yang berkaitan dengan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD).

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tupoksi Diskominfotik Kota Banda Aceh dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi. LKjIP Diskominfotik Kota Banda Aceh berisi laporan tentang

pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang bersifat hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) penting dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra dan Perjanjian Kinerja (PK). Dokumen LKjIP diharapkan dapat memberikan suatu simpulan pencapaian pelaksanaan tupoksi Diskominfotik serta dapat dipergunakan sebagai titik tolak dan bahan analisis dalam rangka meningkatkan kinerja Diskominfotik Kota Banda Aceh di tahun-tahun berikutnya. Beberapa tujuan utama dari LKjIP Diskominfotik yaitu :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada para *stakeholder* atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Diskominfotik Kota Banda Aceh;
2. Mendorong Diskominfotik Banda Aceh di dalam melaksanakan tupoksinya secara baik dan benar yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para *stakeholder*;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Diskominfotik Kota Banda Aceh untuk meningkatkan kinerjanya pada tahun-tahun yang akan datang baik dari segi kebijakan, prosedur, pelaporan, pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Diskominfotik Kota Banda Aceh atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Banda Aceh;
5. Sebagai media pertanggungjawaban kinerja Diskominfotik, dan
6. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Diskominfotik bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

1.3. Aspek Strategis Organisasi

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis Diskominfotik serta mencari solusi pencegahan (*prevention*) terhadap hal-hal yang dapat menghambat pencapaian tujuan dan sasaran strategis tersebut. Rumusan strategi Diskominfotik menunjukkan adanya keinginan yang kuat dalam menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* yang menerima layanan dari Diskominfotik. Beberapa strategi yang dilaksanakan oleh Diskominfotik yaitu :

1. Melakukan pembinaan dan *update* data sektoral Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam konsolidasi forum data dan pengelolaan data sektoral;
2. Penyediaan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berkualitas;
3. Pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) TIK dan data sektoral;
4. Melakukan pengembangan sarana dan prasarana sistem informasi dan komunikasi;
5. Memperbaiki tingkat kesadaran terkait dengan isu keamanan data dan informasi;
6. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan dan pelayanan publik secara terpadu, dengan tertib administrasi yang transparan, akuntabel dan cepat berbasis *Information Technology* (IT), dan
7. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Diskominfotik.

1.4. Gambaran Umum

A. Kedudukan

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh. Diskominfotik Kota Banda Aceh sebagai salah satu SKPD di dalam lingkup Pemerintah Kota Banda Aceh yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota Banda Aceh dan diperkuat dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Banda Aceh. Diskominfotik Kota Banda Aceh yang merupakan *leading sector* penyelenggaraan pelayanan komunikasi, sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta penyebaran informasi kepada masyarakat Kota Banda Aceh dan para *Stakeholder* lainnya.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian yang menjadi

kewenangan Kota Banda Aceh dan tugas pertolongan yang diberikan kepada Kota Banda Aceh dengan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut di atas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika yaitu :
 - a) Melaksanakan pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
 - b) Melaksanakan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Kota, dan
 - c) Melakukan pengelolaan e-government.
2. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik yaitu melakukan penyelenggaraan statistik sektoral.
3. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian yaitu :
 - a) Melakukan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, dan
 - b) Melakukan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah Kota.

C. Susunan Organisasi

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh, merupakan salah satu lembaga pemerintah kota Banda Aceh yang melaksanakan kegiatan di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Kota Banda Aceh Nomor 54 tanggal 20 Desember 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh.

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh terdiri dari :

1. Kepala Dinas
 - a) Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset, dan
 - 3) Sub Bagian Program dan Pelaporan.
 - b) Bidang Pengelolaan Informasi Publik, membawahi :
 - 1) Seksi Pengelolaan Informasi dan Opini Publik, dan
 - 2) Seksi Penyedian Konten dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik.
 - c) Bidang E-Government, membawahi :
 - 1) Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan
 - 2) Seksi Pengelolaan Aplikasi, Keamanan Informasi, Telekomunikasi dan Persandian
 - d) Bidang Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City,membawahi :
 - 1) Seksi Layanan Hubungan Media, dan
 - 2) Seksi Penguatan Sumber Daya Komunikasi dan Ekosistem Smart City.
 - e) Bidang Statistik, membawahi :
 - 1) Seksi Survei Sektoral, dan
 - 2) Seksi Kompilasi dan Publikasi Produk Sektoral.
 - f) Kelompok Jabatan Fungsional, dan
 - g) Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh terlampir.

D. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sebagai faktor penunjang sumber daya manusia (SDM), jumlah pegawai Diskominfotik Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 1.1., 1.2, 1.3, dan 1.4.

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Diskominfotik Berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	Golongan	JUMLAH		JUMLAH (orang)	Ket
		Laki-laki	Perempuan		
1	PNS				
	IV/c	1	-	1	
	IV/b	1	-	1	
	IV/a	6	2	8	
	III/d	6	3	9	
	III/c	2	-	2	
	III/b	3	1	4	
	III/a	2	1	3	
	II/d	1	2	3	
	II/c	-	-	-	
9	Jumlah PNS	22	9	31	
	Non PNS				
	Peg. Kontrak	17	8	25	
	Jumlah Non PNS	17	8	25	
	JML PNS + NON PNS	39	17	56	

(Sumber: Subbagian Keppegawaiian, Umum dan Aset Diskominfotik Kota Banda Aceh, Tahun 2025)

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Diskominfotik Berdasarkan Jabatan/Eselonering

No.	Jabatan	Eselonering	Jumlah orang
1	Kepala Dinas	II. b	1
2	Sekretaris	III. a	1
3	Kepala Bidang	III. b	4
4	Jabatan Fungsional	IV. a	8
5	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset	IV. a	1
6	Kepala Tata Usaha (UPTD)	IV. b	0
	Jumlah		15

(Sumber: Subbagian Kepegawaian Diskominfotik Kota Banda Aceh, Tahun 2025)

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Diskominfotik Menurut Tingkat Pendidikan Formal

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah orang
1	S 2	6
2	S 1	20
3	D IV	0
3	D III	3
4	SLTA/Sederajat	2
5	SLTP/Sederajat	0
6	SD/Sederajat	-
	Jumlah	31

(Sumber: Subbagian Kepegawaian Diskominfotik Kota Banda Aceh, Tahun 2025)

Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Diskominfotik Menurut Jenjang Pendidikan Struktural

No.	Tingkat Jenjang Pendidikan Struktural	Jumlah orang
1	S pamen / PIM – II	1
2	S pama / PIM – III	4
3	Adum / PIM – IV	10
Jumlah		15

(Sumber : Subbagian Kepegawaian Diskominfotik Kota Banda Aceh ,
Tahun 2025)

1.5. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Semester I Tahun 2025 pada dasarnya berfungsi untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja terhadap tujuan dan sasaran strategis Diskominfotik Kota Banda Aceh pada sampai dengan akhir Semester I Tahun 2025. Capaian kinerja (*performance results*) tersebut kemudian dibandingkan dengan rencana kinerja (*performance plan*) sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini memungkinkan untuk dilakukan identifikasi terhadap sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja Diskominfotik dimasa yang akan datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian LKjIP Diskominfotik Kota Banda Aceh dapat diilustrasikan sebagai berikut.

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Aspek Strategis Organisasi
- 1.4 Gambaran Umum
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Rencana Strategis
- 2.2. Tujuan dan Sasaran

- 2.3. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
- 2.4. Rencana Kinerja
- 2.5. Penetapan Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun guna menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah. Renstra Diskominfotik akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Diskominfotik (Renja) yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh, sehingga Renstra Diskominfotik Kota Banda Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026.

Rencana strategis disusun untuk menindaklanjuti program RPD ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD jangka menengah. Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra SKPD terkait dengan sasaran RPD, dengan demikian Renstra SKPD tidak terlepas dari sasaran yang telah ditetapkan dalam RPD dan Renstra Provinsi.

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Rumusan strategi Diskominfotik menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Diskominfotik ingin menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* yang menerima layanan yang diberikan. Adapun strategi yang ditempuh oleh Diskominfotik adalah :

1. Melakukan pembinaan dan update data sektoral Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam konsolidasi forum data dan pengelolaan data sektoral;
2. Penyediaan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berkualitas;
3. Pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) TIK dan data sektoral;
4. Melakukan pengembangan sarana dan prasarana sistem informasi dan komunikasi;
5. Memperbaiki tingkat kesadaran terkait dengan isu keamanan data dan informasi;
6. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan dan pelayanan publik secara terpadu, dengan tertib

administrasi yang transparan, akuntabel dan cepat berbasis *Information Technology* (IT), dan

7. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Diskominfotik.

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil dan digunakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dan terfokus di dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi Diskominfotik. Kebijakan yang dilakukan Diskominfotik adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengembangan SDM terkait TIK dan data sektoral serta sosialisasi;
2. Melakukan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana TIK dan informasi publik serta data sektoral;
3. Melakukan proses pengumpulan, verifikasi dan validasi data sektoral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Melakukan pemeliharaan sistem informasi dan komunikasi publik yang dimiliki;
5. Perumusan dan penetapan kebijakan, rencana induk dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, dan
6. Melakukan perbaikan tata kelola keamanan dan jaring komunikasi sandi.

2.2. Tujuan dan Sasaran

2.2.1. Tujuan

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 4 tahun ke depan. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh dapat dengan tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi tuntutan visinya. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan adanya penetapan tujuan akan dapat diletakkan kerangka prioritas untuk menentukan arah, guna pencapaian keberhasilan sebagai motivator dan pendorong bagi kinerja yang memuaskan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Tujuan Dinas

Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh adalah Tersedianya Data dan Informasi yang Berkualitas dan Terintegrasi dalam Kota Banda Aceh.

2.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan target yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan suatu tujuan yang jelas yang dilandasi dengan visi dan misi yang jelas. Adapun yang menjadi sasaran Diskominfotik Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi, dan
2. Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan informasi publik.

Tujuan dan Sasaran Diskominfotik Kota Banda Aceh bisa dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Serta Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Diskominfo Tahun 2023-2026

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KRITERIA PENILAIAN	KOND ISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN				KONDI SI AKHIR (2026)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tujuan : 1. Tersedianya data dan Informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam kota banda aceh	Persentase data dan informasi Kota Banda Aceh yang berkualitas dan terintegrasi		-	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Laporan Tahunan
Sasaran : 1.1 Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi 1.2 Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik	1.1. 1	Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah data set yang tersedia}}{\text{Jumlah data set yang diharapkan}} \times 100\%$	25%	27%	29%	31%	33%	BIDANG STATISTIK	Laporan Tahunan
	1.1. 2	Persentase website OPD yang aktif	$\frac{\text{Jumlah website SKPD yang update dalam satu tahun}}{\text{Jumlah seluruh website SKPD}} \times 100\%$	80%	82%	84%	86%	88%	BIDANG PIP & BIDANG HUBMED dan PENYELENGGARAAN SMART CITY	Laporan Bulanan dan Tahunan
	1.1. 3	Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang memiliki aplikasi}}{\text{Jumlah seluruh SKPD}} \times 100\%$	55%	57%	59%	61%	63%	BIDANG E-GOV dan BIDANG HUBMED & PENYELENGGARAAN SMART CITY	Laporan Triwulan dan Tahunan

(Renstra dan IKU Diskominfo 2023-2026)

2.3. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diantaranya melalui satu atau beberapa program yang didukung oleh kegiatan dan dirincikan lagi ke dalam beberapa sub kegiatan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Dalam mengimplementasikan perencanaan, pada penjabarannya dilakukan prioritisasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Prioritas program dan kegiatan tersebut menjadi pedoman pelaksanaan fungsi Perangkat Daerah dalam merealiasikan perencanaan pembangunan.

Kegiatan adalah bagian dari atau mengacu kepada program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan penggerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Sub Kegiatan merupakan bentuk dari implementasi atau aktivitas kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya dan mengacu kepada program sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan Diskominfotik yang telah dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.3.1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1.4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.4.3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - 1.4.4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.5.1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.5.2. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - 1.5.3. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.6.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Mebel
 - 1.7.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
 - 1.7.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.7.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Pengelolaan Informasi & Komunikasi Publik
 - 2.1. Kegiatan Pengelolaan informasi & Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1.1. Sub Kegiatan Relasi Media
 - 2.1.2. Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
 - 2.1.3. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
 - 2.1.4. Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik
 - 2.1.5. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - 2.1.6. Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Komunikasi Publik
 - 2.1.7. Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik

3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
 - 3.1. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.1.1. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda
 - 3.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi
 - 3.1.3. Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang Sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah
 - 3.1.4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
 - 3.1.5. Sub Kegiatan Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas Sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas
 - 3.1.6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE
 - 3.1.7. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 - 4.1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - 4.1.1. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
 - 4.1.2. Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
 - 5.1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 5.1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
 - 5.2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 5.2.1. Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2.4. Rencana Kinerja

Penyusunan Rencana Kinerja Diskominfotik Kota Banda Aceh merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan indikator tujuan dan sasaran beserta targetnya yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan akan dilaksanakan oleh Diskominfotik Kota Banda Aceh pada tahun 2025 yang

memuat sasaran strategis, indikator tujuan dan sasaran kinerja serta target atas seluruh indikator kinerja pada tingkat sasaran yang akan dicapai melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan. Rencana Kinerja Diskominfotik Kota Banda Aceh tahun 2025 bisa dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Diskominfotik (IKU) Tahun 2025

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		TARGET KINERJA (%)
	1	2	
Tujuan :	Percentase data dan informasi Kota Banda Aceh yang berkualitas dan terintegrasi		100
1. Tersedianya data dan Informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam kota banda aceh	Sasaran :	1.1.1 Percentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	31
1.1 Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi		1.1.2 Percentase website OPD yang aktif	86
1.2 Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik		1.1.3 Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	61

2.5. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan tekad janji yang akan diwujudkan oleh pejabat penerima amanah beban kerja kepada atasan langsung atau bisa juga merupakan gambaran capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu unit kerja dalam satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus dari Penetapan Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Adapun Perjanjian Kinerja Diskominfotik Kota Banda Aceh tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.3. Sementara itu, program, kegiatan dan sub kegiatan yang secara langsung mengacu kepada pemenuhan target penetapan kinerja bisa dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi	Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	31%
2	Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik	Persentase website OPD yang aktif	86%
		Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	61%

Tabel 2.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mengacu Kepada Pemenuhan Target Penetapan Kinerja

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Relasi Media	688.899.913
			Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	30.935.900
			Pelayanan Informasi Publik	60.000.000
			Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik	55.888.307
			Pengelolaan Media Komunikasi Publik	58.371.382
			Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	15.000.000
			Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	15.000.000
2	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda	46.742.000
			Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	38.150.919
			Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang Sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	42.987.367

		Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	153.115.626
		Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas Sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	100.000.000
		Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	76.204.000
		Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE	-
3	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral -
			Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional 100.000.000
4	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 7.076.730
		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota -

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh telah melakukan pengukuran dan penilaian kinerja yang mengacu kepada dokumen Perjanjian Kinerja Diskominfotik Tahun 2025. Penilaian ini dilakukan untuk mengukur pencapaian kinerja yang telah disepakati dimana hal ini akan menggambarkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Diskominfotik Kota Banda Aceh. Pencapaian tujuan dan sasaran strategis Diskominfotik diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang memiliki target yang harus dicapai. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi target kinerja dari indikator kinerja tersebut pada tahun 2025. Capaian kinerja Diskominfotik pada Semester I tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Semester I Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase
1	Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi	Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	Persentase	31%	15,5%	50%
2	Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik	Persentase website OPD yang aktif	Persentase	86%	43%	50%
		Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	Persentase	61%	30,5%	50%

Pada Tabel 3.1 bisa dilihat bahwa pada Semester I tahun 2025 terdapat dua sasaran strategis yang harus dicapai oleh Diskominfotik, dimana pada sasaran strategis pertama terdapat satu indikator kinerja yang mencapai realisasi target 50%. Pada sasaran strategis yang kedua terdapat dua indikator kinerja dimana semua indikator tersebut mencapai realisasi target 50%.

3.1.1. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025 dengan Renstra 2023-2026

A. Sasaran Tersedianya Data Statistik Sektoral yang Berkualitas dan Terintegrasi

Tolok ukur tercapainya Sasaran Tersedianya Data Statistik Sektoral yang Berkualitas dan Terintegrasi diukur dengan satu indikator yang harus terpenuhi yaitu Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan Tepat Waktu. Pencapaian kinerja dari indikator ini bisa dilihat pada Tabel 3.2.

**Tabel 3.2 Target dan Realisasi Kinerja Semester I Tahun 2025
Sasaran 1**

No	Indikator Sasaran	Baseline Tahun 2018	Capaian Tahun 2024	Semester I 2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d Semester I 2025 terhadap Target 2026 (%)
				Target	Realisasi	Persentase Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1	Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	5%	29%	31%	15,5%	50%	33%	47,0%

Persentase capaian realisasi target kinerja dihitung dengan formula $\frac{\text{Jumlah data set yang tersedia}}{\text{Jumlah data set yang diharapkan}} \times 100\%$ dan melihat kepada capaian atau realisasi kinerja pada Semester I tahun 2025 yang dibagi dengan target yang sudah ditetapkan, indikator kinerja ini sudah mencapai target realisasi kinerja yang diharapkan yaitu 15,5%.

Pada Tabel 3.2 dapat dilihat bahwa *baseline* perhitungan indikator sasaran Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu adalah sebesar 5%. Untuk capaian target kinerja pada tahun 2024 sendiri Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu adalah 29% dimana capaian ini sesuai dengan target yang tercantum pada Renstra Diskominfo. Sementara itu capaian target kinerja pada Semester I tahun 2025 sesuai dengan target yang tercantum pada Renstra Diskominfo yaitu 15,5%.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Diskominfo pada tahun 2026, capaian target kinerja Persentase Data Statistik

Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu sampai dengan Semester I tahun 2025 sudah mencapai angka pemenuhan sebanyak 47%.

Tercapainya target kinerja pada sasaran Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu disebabkan oleh tercapainya penyediaan data set yang diharapkan dan juga terupdatenya data statistik sektoral oleh Diskominfotik. Pada tahun 2025 program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian target sasaran ini dilaksanakan oleh Bidang Statistik sebagai penanggungjawabnya. Diskominfotik harus mampu untuk terus meningkatkan kualitas penyediaan data statistik sektoral yang berkualitas dan selalu terbarukan (*update*) atau tepat waktu serta terus meningkatkan sinergitas dengan para *stakeholder* data statistik sektoral, baik di dalam lingkungan OPD pada Pemerintah Kota Banda Aceh, Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, Universitas yang ada di Kota Banda Aceh dan *stakeholder* lainnya.

Sementara itu untuk mencapai target kinerja pada Indikator Kinerja sasaran Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu didukung oleh 1 (satu) program yaitu Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang memiliki 1 (satu) kegiatan yaitu Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan 2 (dua) sub kegiatan yaitu Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral dan Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional dimana tingkat realisasi anggarannya tidak mencapai target atau 0%. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.4.

B. Sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Teknologi Informasi dan Pengelolaan Informasi Publik

Tolok ukur tercapainya Sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Teknologi Informasi dan Pengelolaan Informasi Publik diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu Persentase Website OPD yang Aktif dan Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan. Pencapaian kinerja dari indikator ini bisa dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Target dan Realisasi Kinerja Semester I Tahun 2025
Sasaran 2

No	Indikator Sasaran	Baseline Tahun 2018	Capaian Tahun 2024	Semester I 2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d Semester I 2025 terhadap Target 2026 (%)
				Target	Realisasi	Persentase Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1	Persentase website OPD yang aktif	65%	84%	86%	43%	50%	88%	48,9%
2	Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	0%	59%	61%	30,5%	50%	63%	48,4%

Pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Teknologi Informasi dan Pengelolaan Informasi Publik didukung oleh 2 (dua) indikator dimana kedua indikator ini semuanya mencapai target yang ditetapkan. Rincian pencapaian target sasaran melalui indikator sasaran ini dapat dijelaskan sebagai berikut,

1. Persentase Website OPD yang Aktif sudah mencapai target yang telah ditetapkan pada Semester I Tahun 2025 dimana angka realisasi pencapaian dari Website OPD yang Aktif adalah sebesar 43% dari semua website OPD yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Angka dan data ini diperoleh dengan perhitungan formula $\frac{\text{Jumlah website SKPD yang update dalam satu tahun}}{\text{Jumlah seluruh website SKPD}} \times 100\%$. Pada Tabel 3.3 dapat dilihat bahwa *baseline* perhitungan indikator sasaran Persentase Website OPD yang Aktif adalah sebesar 65%. Untuk capaian target kinerja pada tahun 2024 adalah sebanyak 84% dan sesuai dengan target yang tercantum pada Renstra Diskominfotik. Sementara capaian target kinerja pada tahun 2025 sesuai dengan target yang tercantum pada Renstra Diskominfotik yaitu 42%. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra pada Tahun 2026, capaian target kinerja Persentase Website OPD yang Aktif sampai dengan Semester I tahun 2025 sudah mencapai angka

48,9%. Tercapainya target kinerja pada Indikator Sasaran Persentase Website OPD yang Aktif dikarenakan oleh perhitungan jumlah website SKPD atau OPD yang aktif di dalam memberikan dan melakukan update berita dibandingkan dengan jumlah seluruh website SKPD yang dikelola pada lingkungan Pemerintahan Kota Banda Aceh sudah mencapai target yang diharapkan dan dapat dipantau secara langsung oleh publik melalui aplikasi sinergi di alamat: sinergi.bandaacehkota.go.id.

2. Persentase Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan sudah mencapai target yang telah ditetapkan pada Semester I Tahun 2025 yaitu sebesar 61% dimana angka realisasi pencapaian Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan adalah sebesar 30,5%. Angka ini sudah sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Diskominfo yang telah ditetapkan. Angka dan data ini diperoleh dengan perhitungan formula

$$\frac{\text{Jumlah SKPD yang memiliki aplikasi}}{\text{Jumlah seluruh SKPD}} \times 100\%. \text{ Pada Tabel 3.3 dapat dilihat bahwa}$$

baseline perhitungan indikator sasaran Persentase Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan adalah sebesar 0%. Untuk capaian target kinerja pada tahun 2024 sendiri Persentase Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan adalah sebanyak 59% sesuai dengan target yang tercantum pada Renstra Diskominfo sehingga Target Kinerja Sasaran Cakupan Layanan E-Government ini baru dilakukan pada Tahun 2020. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Diskominfo pada Tahun 2026, capaian target kinerja Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan sampai dengan Semester I tahun 2025 sudah mencapai angka 48,4%.

3.1.2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja, Kendala dan Alternatif Solusi/Upaya

Analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja dari Diskominfo untuk target kinerja pada Semester I tahun 2025 dapat dilihat dari pencapaian kinerja atas target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan pada Tabel 3.2 dan Tabel 3.3. Analisis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja, Kendala dan Upaya yang Dilakukan pada Pencapaian Indikator Kinerja sasaran Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu

Berdasarkan Tabel 3.2 dapat dilihat bahwa pada Semester I tahun 2025 target kinerja pada Indikator Kinerja sasaran Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu adalah sebanyak 15,5%. Berdasarkan dari pencapaian target kinerja dari tahun 2018, sampai dengan tahun 2024, target yang diharapkan pada tahun 2025 masih sesuai dengan Renstra Diskominfotik tahun 2023-2026. Pada tahun 2025 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian target sasaran ini dilaksanakan oleh Bidang Statistik sebagai penanggungjawabnya.

1. Kendala/Hambatan yang Dihadapi

Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi di dalam pencapaian indikator kinerja sasaran Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu adalah :

- Belum banyak bentuk data statistik sektoral yang digunakan di lingkungan Kota Banda Aceh sehingga masih terjadinya benturan penyediaan data sektoral yang dibutuhkan diantara OPD yang menjadi sumber atau produsen data dengan Diskominfotik Kota Banda Aceh sebagai pengelola data;
- Kebijakan refocusing anggaran dan kebijakan Surat Penyediaan Dana (SPD) ketat pada Pemerintah Kota Banda Aceh semenjak tahun 2021 memaksa dibutuhkan adanya kebijakan penyesuaian dan pengalihan prioritas anggaran yang diberikan kepada beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga menyebabkan anggaran untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai target indikator kinerja sasaran Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu dihapus dan dialihkan kepada program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas;
- Pemanfaatan data statistik masih belum maksimal dikarenakan Surat Keputusan Kepala Bappeda No. 60 Tahun 2024 tidak melibatkan Diskominfotik sebagai pengguna data untuk perencanaan, monitoring, evaluasi, atau penyusunan kebijakan

sehingga menyebabkan pengelolaan kegiatan Statistik masih kurang maksimal karena belum ada aturan baku bagi OPD untuk melaporkan kegiatan statistik kepada BPS;

2. Upaya yang Dilakukan

Adapun upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian indikator kinerja sasaran Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu adalah :

- Diskominfotik tetap berupaya maksimal meskipun tidak tersedianya anggaran dengan melakukan beberapa strategi seperti menjalin kerja sama intensif dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banda Aceh, Universitas Negeri dan Swasta di Kota Banda Aceh seperti Universitas Syiah Kuala, Politeknik Aceh dan Universitas Lainnya dan *stakeholder* lainnya;
- Diskominfotik juga terus berupaya melakukan pembakuan bentuk dataset statistik sektoral yang digunakan, menyusun konsep dasar, metodologi, dan tata kelola satu data, terus berupaya melakukan pembentukan dan penguatan kelembagaan forum satu data serta terus melakukan proses integrasi data dari seluruh *stakeholder* Diskominfotik Kota Banda Aceh;
- Diskominfotik terus melakukan penguatan implementasi Satu Data Indonesia dengan memastikan penerapan standar metadata statistik dilakukan secara menyeluruh oleh seluruh OPD, mengacu pada Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2021;
- Meningkatkan pengawasan dan pelaporan untuk memastikan kesesuaian standar data dimana hal ini bertujuan untuk peningkatan kualitas data statistik;
- Diskominfotik terus berkoordinasi dengan BPS terkait dengan pematangan kualitas rencana kerja untuk meningkatkan aktualitas data, terutama melalui pemantauan jadwal diseminasi, melakukan mekanisme verifikasi dan validasi keterbandingan data di seluruh OPD guna memastikan konsistensi;

B. Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja, Kendala dan Upaya yang Dilakukan pada Pencapaian Indikator Kinerja sasaran Persentase Website OPD yang Aktif

Berdasarkan Tabel 3.3 dapat dilihat bahwa capaian target kinerja pada Semester I tahun 2025 sesuai dengan target yang tercantum pada Renstra Diskominfotik yaitu 43%. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra pada Tahun 2026, capaian target kinerja Persentase Website OPD yang Aktif sampai dengan tahun 2025 sudah mencapai angka 48,9%. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian target sasaran ini dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Informasi Publik (PIP) dan Bidang Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City sebagai penanggungjawab. Pemerintah Kota Banda Aceh terus berupaya agar semua OPD yang memiliki situs/website dan mengaktifkan situs/website tersebut sesuai amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Melalui situs/website OPD yang aktif dapat dinilai keseriusan pemerintah Kota Banda Aceh dalam melakukan *city branding* kepada masyarakat luas, bukan hanya level kota, namun juga pastinya akan menyentuh level provinsi, nasional bahkan dunia internasional. OPD juga mulai melirik pemanfaatan media sosial yang memiliki segmentasi pembaca/pengikut (*followers*) yang menyasar kaum muda secara luas.

1. Kendala/Hambatan yang Dihadapi

Adapun kendala dan hambatan di dalam mencapai target kinerja Persentase Website OPD yang Aktif adalah :

- Beragamnya tingkat respon keaktifan OPD dalam mengupdate website yang dimiliki;
- Masih terdapat OPD yang tidak atau kurang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kualitas di dalam melakukan updating berita atau informasi ke dalam website yang dimiliki;
- Terbatas dan kurang menariknya berita dan informasi yang dihasilkan dan disebarluaskan melalui media informasi dimana hal ini disebabkan karena di dalam produksi berita atau informasi belum sesuai dengan standar penulisan berita atau informasi,

serta hanya berorientasi dengan jumlah yang diproduksi bukan kualitas yang dihasilkan, dan

- Kualitas dan konsistensi data yang masih belum sempurna dimana hal ini disebabkan oleh belum semua OPD memiliki kemampuan teknis yang memadai untuk menyajikan berita dan informasi yang akurat dan tepat waktu.

2. Upaya yang Dilakukan

Adapun upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja Persentase Website OPD yang Aktif adalah:

- Diskominfotik terus berupaya untuk mampu mencapai target yang telah ditetapkan dengan cara menerbitkan secara rutin Surat Edaran Wali Kota Banda Aceh tentang Update Data dan Berita Website OPD yang didistribusikan ke seluruh OPD dalam Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
- Selain itu Diskominfotik terus berupaya memonitor, mengelola dan berkoordinasi dengan OPD pada lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh sehingga informasi publik dapat rutin diperbarui atau diupdate dan dibagikan melalui website OPD sehingga jumlah persentase website OPD yang aktif pada tahun berikutnya tercapai dan diharapkan semakin naik;
- Diskominfotik terus melakukan koordinasi dan mengharapkan inisiasi serta keaktifan dari setiap OPD di Kota Banda Aceh di dalam menunjang pencapaian target sasaran kinerja sehingga informasi publik dapat rutin diperbarui atau diupdate dan dibagikan melalui website OPD, dan
- Diskominfotik terus melakukan pelatihan baik secara langsung, luring maupun daring kepada seluruh personil OPD di dalam meningkatkan kualitas dan pemahaman di dalam melakukan produksi, updating dan pengelolaan berita dan informasi di dalam website OPD.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja, Kendala dan Upaya yang Dilakukan pada Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Cakupan Layanan E-Government

Berdasarkan Tabel 3.3 dapat dilihat bahwa capaian indikator Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan sudah mencapai target yang telah ditetapkan pada Semester I Tahun 2025

yaitu sebesar 30,5%. Tercapainya target kinerja pada indikator sasaran Persentase Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan dikarenakan perbandingan dari mampu dilayani jumlah OPD yang memiliki aplikasi dibandingkan dengan jumlah seluruh OPD yang ada di lingkungan Pemerintahan Kota Banda Aceh oleh Diskominfotik. Jumlah ini diperoleh dari laporan bulanan dan tahunan yang diberikan oleh Bidang E-Government dan Bidang Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City sebagai penanggung jawab. Dikarenakan pada kriteria indikator kinerja Cakupan Layanan E-Government yang dikelola oleh Diskominfotik menyatakan bahwa semua aplikasi yang berada di bawah wewenang Pemerintah Kota Banda Aceh melalui setiap OPD, baik aplikasi khusus maupun publik, wajib dikelola oleh Diskominfotik Kota Banda Aceh melalui Bidang E-Government dan Bidang Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City. Oleh karena itu diharapkan Diskominfotik mampu untuk terus mengelola dan melayani setiap OPD yang memiliki aplikasi di dalam lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Namun terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Diskominfotik selain mengelola semua aplikasi pada lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh yaitu melengkapi dokumen pendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kota Banda Aceh seperti *masterplan/blue print* SPBE, dokumen arsitektur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kota Banda Aceh, dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP), aspek manajemen SPBE dan aspek Audit TIK yang dimiliki serta dokumen Proses Bisnis aplikasi-aplikasi yang digunakan pada lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Hal ini sangat penting untuk dilakukan dikarenakan komponen penilaian oleh Pemerintah Pusat dilakukan terhadap setiap indikator SPBE, penetapan standar interoperabilitas data dan informasi antar layanan SPBE, penetapan Standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus dan Aplikasi Umum yang digunakan di dalam Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Hal lain yang tidak kalah penting adalah membangun koordinasi dan kolaborasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di dalam mendukung peningkatan penilaian SPBE dengan memaksimalkan peran Tim

Koordinasi SPBE Kota Banda Aceh. Tim Koordinasi SPBE ini diharapkan dapat berperan untuk merencanakan, menerapkan serta mengevaluasi pelaksanaan SPBE khususnya terkait dengan capaian dari setiap Domain, Aspek dan Indikator SPBE sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Satu aspek lainnya di dalam pencapaian Cakupan Layanan E-Government adalah proses integrasi aplikasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Diharapkan kedepannya Diskominfotik mampu untuk terus bekerja sama dengan seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dan terus bersinergi dan berkoordinasi di dalam pendataan dan survey agar jumlah aplikasi yang ada tetap terdata dengan baik sehingga proses integrasi keseluruhan aplikasi yang ada bisa dilakukan dengan baik sehingga target Persentase Cakupan Layanan E-Government dapat tercapai.

1. Kendala/Hambatan yang Dihadapi

Adapun kendala dan hambatan di dalam mencapai target kinerja Persentase Cakupan Layanan E-Government adalah :

- Diskominfotik masih memiliki kelemahan di dalam jumlah SDM terutama tenaga ahli IT (*programmer, networking, IT Support, dll*) yang dibutuhkan serta anggaran yang diberikan kepada Diskominfotik belum memadai;
- Masih banyaknya perangkat kerja IT yang dimiliki oleh Diskominfotik belum dilakukan peremajaan sehingga kualitas kinerja masih belum maksimal;
- Belum semua OPD memiliki data elektronik yang bisa diintegrasikan sehingga di dalam pemanfaatannya masih menggunakan data manual yang tidak sesuai dengan penilaian SPBE;
- Pembangunan aplikasi di dalam lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh masih banyak yang tidak mempertimbangkan proses bisnis dan peta rencana SPBE yang terintegrasi sehingga menimbulkan redundansi fungsi aplikasi yang dibangun dan tidak bisa dilakukan integrasi;

2. Upaya yang Dilakukan

Adapun upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja Persentase Cakupan Layanan E-Government adalah :

- Melakukan permintaan penambahan SDM Ahli di posisi-posisi yang masih belum terisi, penambahan anggaran untuk melakukan peremajaan dan pemeliharaan perangkat yang dimiliki serta memperbanyak bimtek/diklat/pelatihan kepada SDM yang dimiliki;
- Melakukan rapat rencana tindak lanjut implementasi arsitektur SPBE dalam proses perencanaan dan penganggaran Kota Banda Aceh bersama Bapedda dan BPPK dipimpin oleh Sekretaris Daerah;
- Membuat dokumen resmi (Nota Kesepahaman/Surat Edaran/Surat Keputusan) terkait keterpaduan perencanaan dan penganggaran SPBE sehingga pelaksanaan SPBE menjadi salah satu program prioritas daerah, dan
- Melakukan evaluasi Arsitektur dan Peta Rencana SPBE yang dipimpin oleh Bappeda secara berkala untuk memastikan ketercapaian target SPBE.

3.1.3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya/Anggaran Terhadap Program Diskominfotik

Usaha Diskominfotik untuk mencapai target kinerja pada sasaran Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi dan Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan informasi publik pada Semester I Tahun 2025 membutuhkan performa kinerja yang mumpuni (seperti yang bisa dilihat pada sub bab sebelumnya) dan didukung oleh capaian realisasi anggaran 4 (empat) program pendukung utama yang terkait langsung dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Diskominfotik dan memiliki 6 (enam) kegiatan yang kemudian dirincikan dengan sub-sub kegiatan. Salah satu alat ukur di dalam mengukur capaian keberhasilan performa kinerja tersebut adalah dengan menggunakan Analisis Efisiensi.

Analisis efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumberdaya/biaya untuk mencapai hasil dari program/kegiatan/sub kegiatan yang dijalankan. Adapun rumus yang digunakan untuk mencari tingkat efisiensi adalah :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Input Target}}{\text{Input Aktual}} \geq 1$$

- Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual lebih besar atau sama dengan 1(satu) maka akan terjadi efisiensi
- Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual kurang daripada 1 (satu) maka efisiensi tidak tercapai

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya/Anggaran Terhadap Program yang telah dilaksanakan pada Diskominfotik dapat dilihat pada Tabel 3.4, Tabel 3.5, dan Tabel 3.6.

Tabel 3.4 Tingkat Efisiensi Anggaran Program Terhadap Capaian Pendukung IKU 1

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kinerja Semester I Tahun 2025		Percentase Capaian Terhadap Target	Anggaran Tahun 2025		Percentase Realisasi Anggaran Terhadap Pagu DPPA
		Target (Renstra)	Capaian		Pagu DPPA (Rp)	Realisasi (Rp)	
Indikator 1: Percentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	Percentase	31	15,5	50	38.806.700	-	-
Percentase Rata-rata Capaian Kinerja			50	Percentase Rata-rata Penyerapan Anggaran		0	
Tingkat Efisiensi =		0					

Pada pelaksanaan program yang mendukung capaian Percentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu tidak dapat dianalisis dikarenakan oleh program ini tidak memiliki realisasi anggaran namun indikator tetap dilaksanakan dikarenakan indikator ini penting untuk mengetahui Percentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu.

Tabel 3.5 Tingkat Efisiensi Anggaran Program Terhadap Capaian Pendukung IKU 2

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kinerja Semester I Tahun 2025		Percentase Capaian Terhadap Target	Anggaran Tahun 2025		Percentase Realisasi Anggaran Terhadap Pagu DPPA
		Target (Renstra)	Capaian		Pagu DPPA (Rp)	Realisasi (Rp)	
Indikator 2 : Persentase website OPD yang aktif	Persentase	86	43	50	11.301.299.400	3.021.183.000	26,73
Persentase Rata-rata Capaian Kinerja				50	Percentase Rata-rata Penyerapan Anggaran		26,73
Tingkat Efisiensi =		1,87					

Pada pelaksanaan program yang mendukung capaian Persentase website OPD yang aktif tercapai dengan tingkat efisiensi 1,87%.

Tabel 3.6 Tingkat Efisiensi Anggaran Program Terhadap Capaian Pendukung IKU 3

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kinerja Tahun 2025		Percentase Capaian Terhadap Target	Anggaran Tahun 2025		Percentase Realisasi Anggaran Terhadap Pagu DPPA
		Target (Renstra)	Capaian		Pagu DPPA (Rp)	Realisasi (Rp)	
Indikator 3 : Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	Persentase	61	30,5	50	4.123.702.100	97.245.300	2,36
Percentase Rata-rata Capaian Kinerja				50	Percentase Rata-rata Penyerapan Anggaran		2,36
Tingkat Efisiensi =		21,20					

Pada pelaksanaan program yang mendukung capaian Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan tercapai dengan tingkat efisiensi 21,20%.

3.1.4. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya

Selain berupaya mencapai target kinerja dari dua sasaran Strategis seperti yang sudah dijelaskan di atas, Diskominfotik Kota Banda Aceh adalah perangkat daerah yang bertujuan untuk mewujudkan Tujuan dari Rencana Perangkat Daerah (RPD) Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 yaitu Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah, dimana Diskominfotik harus mampu untuk terus menyesuaikan diri terhadap perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang sangat pesat. Untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan tersebut Diskominfotik harus terus berkembang, semakin melengkapi dan memperbarui diri dengan sarana prasarana TIK yang memadai, memiliki manajemen data dan informasi yang berkualitas kinerja tinggi untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Diskominfotik Kota Banda Aceh pada Semester I tahun 2025 memiliki beberapa tugas dan target yang harus dicapai seperti:

1. Melanjutkan kesinambungan upaya Kota Banda Aceh yang telah terpilih sebagai salah satu dari 100 Kota dengan konsep pelayanan Smart City. Salah satu yang utama adalah Diskominfotik terus memperbaiki kualitas fasilitas *command center* yang telah dibangun pada akhir tahun 2020 sampai dengan akhir tahun 2022. Fasilitas ini bertujuan untuk mendukung keterwujudan konsep Smart City sebagai upaya perbaikan pelayanan publik pada Kota Banda Aceh. *Command center* yang juga sebagai ruang pusat kontrol pemantau berfungsi sebagai pusat kontrol data internal yang bisa memonitor langsung keadaan Kota Banda Aceh melalui kamera pemantau atau CCTV yang terpasang pada titik-titik vital. Selain itu fasilitas ini juga berfungsi sebagai pusat kontrol komando monitor data-data, aplikasi-aplikasi dan juga sistem terintegrasi yang berada pada pengawasan Pemerintah Kota Banda Aceh. Diskominfotik terus berupaya untuk melaksanakan Dokumen atau *Master Plan* Smart City sebagai menjadi panduan di dalam mewujudkan Banda Aceh sebagai Kota dengan konsep pelayanan Smart City, melakukan koordinasi dan elaborasi serta terus melakukan upaya-upaya kesinambungan seperti *Forum Group Discussion* (FGD) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) dengan OPD-OPD terkait dengan

- kesinambungan upaya Kota Banda Aceh sebagai salah satu kota dengan konsep pelayanan Smart City.
2. Meningkatkan indeks pencapaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Banda Aceh yang berada di dalam Cakupan Layanan E-Government Pemerintah Kota Banda Aceh.
 3. Memperbaiki dan meningkatkan pemenuhan data statistik sektoral pada lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Diskominfotik terus melakukan pembinaan dan *update* data sektoral Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam konsolidasi forum data dan pengelolaan data sectoral serta untuk meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) melalui Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS);
 4. Terus meningkatkan kualitas sistem dan diseminasi informasi dan komunikasi publik yang berada pada wewenang Pemerintah Kota Banda Aceh yang menjadi tugas Diskominfotik. Selain itu diskominfotik selalu berupaya menjaga predikat Kota Banda Aceh sebagai Kota dengan Keterbukaan Informasi Publik dengan melakukan pengelolaan informasi publik dan juga sistem pengaduan masyarakat melalui Aplikasi SP4N-LAPOR!.

Sementara itu berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pada Semester I tahun 2025, ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Diskominfotik seperti :

1. Ada beberapa program, kegiatan ataupun sub kegiatan yang awalnya tercantum dan sudah dialokasikan anggarannya namun dalam penggerjaannya ada pengalihan prioritas dan pergeseran anggaran sehingga tidak bisa dilaksanakan dikarenakan oleh kebijakan Surat Penyediaan Dana (SPD) ketat ;
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Diskominfotik di dalam menunjang kinerja pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan;
3. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) terutama tenaga ahli IT (*programmer, networker, analis*) yang dimiliki oleh Diskominfotik;
4. Masih belum baku dan tertatanya Standar Operasional Prosedur (SOP), regulasi dan aturan lainnya di dalam pelaksanaan tupoksi Diskominfotik, seperti dokumen pendukung SPBE, Smart City, Statistik dan lain-lain;

5. Belum memadainya fasilitas diseminasi (penyebarluasan) informasi publik;
6. Masih rendahnya kesadaran keamanan data dan informasi yang dimiliki, dan
7. Belum optimalnya pengelolaan data sektoral yang tervalidasi yang terkendala dengan sumber data yang berasal dari OPD dimana hal tersebut disebabkan oleh proses penyerahan data belum dilakukan secara otomatis serta masih perlu dilakukan proses validasi yang baik dan terstruktur serta sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Beberapa strategi atau upaya pemecahan masalah yang akan dilakukan oleh Diskominfotik pada tahun kedepannya adalah :

1. Memaksimalkan anggaran yang diberikan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana TIK yang dimiliki oleh Diskominfotik;
2. Memaksimalkan SDM yang dimiliki dengan cara meningkatkan kemampuan SDM melalui pelatihan, pendidikan, bimbingan teknis, pembinaan dan mencoba untuk membuka rekrutmen atau penerimaan tenaga ahli, terutama tenaga IT dimana tentunya tetap menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia;
3. Melakukan pembinaan dan update data sektoral Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam konsolidasi forum data dan pengelolaan data sektoral;
4. Melakukan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana TIK dan informasi publik serta data sektoral;
5. Pengembangan kapasitas SDM TIK dan data sektoral;
6. Melakukan pengembangan sarana dan prasarana sistem informasi dan komunikasi;
7. Memperbaiki tingkat kesadaran terkait dengan isu keamanan data dan informasi;
8. Melakukan proses pengumpulan, verifikasi dan validasi data sektoral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Melakukan perbaikan tata kelola keamanan dan jaring komunikasi sandi, dan
10. Perumusan dan penetapan kebijakan, rencana induk dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

3.2. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja Diskominfotik pada Semester I Tahun 2025 adalah sebesar 29,34% dari total anggaran yang dialokasikan berdasarkan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Diskominfotik Kota Banda Aceh. Realisasi Keuangan Diskominfotik Kota Banda Aceh Semester I Tahun 2025 dapat dilihat dengan perincian pada tabel 3.7.

Tabel 3.7 Realisasi Keuangan Diskominfotik Semester I Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (DPPA)	Realisasi Anggaran	%
I	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.728.992.655	3.405.598.125	50,61
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.027.100	3.098.800	22,09
A	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.027.100	3.098.800	-
	2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.969.934.855	2.420.363.922	60,97
B	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.969.934.855	2.420.363.922	60,97
	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-
	1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	69.551.300	15.542.097	22,35
D	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.923.100	1.155.900	39,54
	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.914.500	4.615.300	38,74
	3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.713.700	2.486.900	52,76
	4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000	7.283.997	14,57
E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200.000.000	-	-

	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-
	2	Pengadaan Mebel	-	-	-
	3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.000.000	-	-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.202.196.800	861.943.406	39,14
F	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	972.038.000	259.722.262	26,72
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.230.158.800	602.221.144	48,95
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	273.282.600	104.649.900	38,29
G	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	234.360.600	86.700.400	36,99
	2	Pemeliharaan Mebel	-	-	-
	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.922.000	17.949.500	46,12
	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-
II	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik		11.301.299.400	3.021.183.000	26,73
A		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	11.301.299.400	3.021.183.000	26,73
	1	Relasi Media	7.974.525.400	2.869.415.000	35,98
	2	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	-	-	-
	3	Pelayanan Informasi Publik	34.491.900	7.884.000	22,86
	4	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik	29.998.800	7.884.000	26,28
	5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	3.262.283.300	136.000.000	4,17
	6	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	-	-	-
III		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	-	-	-
	Pengelolaan Aplikasi Informatika		4.123.702.100	97.245.300	2,36
	A	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.123.702.100	97.245.300	2,36

		1	Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda	50.236.800	-	-
		2	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	244.133.300	65.983.300	27,03
		3	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang Sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	183.850.000	15.500.000	8,43
		4	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	3.645.482.000	15.762.000	0,43
		5	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas Sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas			-
		6	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	-	-	-
		7	Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE	-	-	-
IV	Penyelenggaraan Statistik Sektoral			38.806.700	-	-
	A	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		38.806.700	-	-
		1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	-	-	-
		2	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	38.806.700	-	-
V	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi			39.586.600	-	-
	A	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		39.586.600	-	-
		1	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	39.586.600	-	-
		B		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-
	B	1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-
		TOTAL		22.232.387.455	6.524.026.425	29,34

Berdasarkan Tabel 3.7 Realisasi Keuangan Diskominfotik Semester I Tahun 2025 mencapai angka Rp 6.524.026.425,- atau sebesar 29,34% dari anggaran yang diberikan yaitu Rp 22.232.387.455,-. Terdapat beberapa program, kegiatan atau sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan berdasarkan Renstra 2023-2026 dan sudah masuk di dalam Rencana Kerja (Renja) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Diskominfotik namun tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir Semester I tahun 2025. Hal ini dikarenakan oleh adanya kebijakan *refocusing* anggaran dan kebijakan Surat Penyediaan Dana (SPD) ketat yang membuat adanya pengalihan anggaran kepada program, kegiatan atau sub kegiatan prioritas.

Serapan dan realisasi keuangan terbesar berada pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang mencapai angka dan presentase Rp 3.405.598.125,- atau 50,61%. Sementara itu serapan dan realisasi keuangan terkecil berada pada Program Pengelolaan Aplikasi Informatika yang hanya sebanyak Rp 97.245.300,- atau 2,36%. Sementara itu anggaran Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Penyelenggaran Persandian Untuk Pengamanan Informasi belum dilakukan penganggaran dana melalui pembukaan SPD berdasarkan kebijakan *refocusing* dan SPD ketat yang menyebabkan pelaksanaan dan realisasi anggaran belum bisa dilakukan dan diharapkan bisa dilakukan pada Semester II Tahun 2025.

3.2.1. Capaian Diskominfotik pada Semester I Tahun 2025

Diskominfotik dalam pelaksanaan tupoksinya pada Semester I tahun 2025 telah berhasil dalam meraih beberapa prestasi yang membanggakan seperti:

1. Bidang Statistik

Bidang Statistik telah berhasil membantu Pemerintah Kota Banda Aceh dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) berdasarkan pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) dengan BPS dengan nilai 1,83 pada tahun 2023 menjadi 2,57 pada tahun 2024

2. Bidang Sekretariat

Bidang Sekretariat telah berhasil membantu Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh meraih peringkat pertama kepatuhan pelaporan pajak tingkat SKPK dalam lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dan pencapaian SAKIP level Pemerintah Kota dengan Nilai Hasil Evaluasi 86,8 dan Tingkat Akuntabilitas Kinerja “A”.

3.2.2. Strategi/Langkah/Kebijakan Upaya Perbaikan Kinerja

Meskipun banyak hambatan, kesulitan baik dari sisi teknis maupun anggaran yang dihadapi oleh Diskominfotik Kota Banda Aceh pada Semester I tahun 2025, usaha-usaha perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi, tupoksi, sasaran strategis dan tujuan Diskominfotik Kota Banda Aceh. Beberapa strategi, langkah dan kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi hal-hal tersebut diantara lain :

1. Menyusun perencanaan kinerja Diskominfotik yang lebih matang dan terpadu yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang dihadapi;
2. Perumusan, penyusunan, penataan, penetapan, pembakuan dan evaluasi kebijakan, rencana induk, Standar Operasional Prosedur (SOP) atau prosedur teknis lainnya yang bisa menunjang tupoksi Diskominfotik;
3. Mengalokasikan anggaran dan dana kepada program, kegiatan dan sub kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana kinerja dan hasil yang akan didapat;
4. Melakukan penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sistem informasi TIK dan informasi publik serta data sektoral yang berkualitas dengan optimalisasi anggaran yang diberikan;
5. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait (BPS, Universitas maupun *stakeholder* lainnya) sehingga komunikasi lintas sektoral dapat terus terjalin sehingga menjadikan kerjasama SKPD semakin meningkat, penguatan implementasi satu data indonesia, peningkatan kualitas data, perbaikan proses bisnis statistik, pengelolaan kelembagaan dengan asas profesionalisme, pemanfaatan statistik nasional dan *big data* dan penguatan tata kelola statistik;
6. Melakukan pembinaan dan update data sektoral Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam konsolidasi forum data dan pengelolaan data sektoral;
7. Melakukan proses pengumpulan, verifikasi dan validasi data sektoral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Meningkatkan dan memaksimalkan kualitas SDM yang dimiliki melalui pelatihan, pendidikan, bimbingan teknis dan pembinaan lainnya, sarana prasarana, profesionalisme, kemampuan dan pemahaman uraian kerja dan seluruh unsur pendukung tupoksi Diskominfotik secara berkesinambungan;

9. Memperbaiki tingkat kesadaran terkait dengan isu keamanan data dan informasi dan melakukan perbaikan tata kelola keamanan dan jaring komunikasi sandi;
10. Terus melakukan sosialisasi dan *transfer knowledge* terkait dengan pelaksanaan kebijakan internal Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang harus memuat aturan yang lengkap mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE) serta terintegrasi antar pemerintah daerah, dan dijadikan sebagai dasar perencanaan dan belanja SPBE dan kebijakan internal harus direview dan dievaluasi secara periodik kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.
11. Memaksimalkan kordinasi antara Admin Koordinator dan Pejabat Penghubung (OPD) dalam Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh serta mengupayakan ketersediaan anggaran untuk dapat menggelar Rapat Teknis seluruh tim teknis pengelola layanan pengaduan masyarakat secara rutin dan simultan;
12. Optimalisasi pencapaian target dengan cara menerbitkan secara rutin Surat Edaran Wali Kota Banda Aceh tentang Update Data dan Berita Website OPD yang didistribusikan ke seluruh OPD dalam Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, pelaksanaan monitoring, pengelolaan dan peningkatan koordinasi dengan SKPD/OPD pada lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh sehingga informasi publik dapat rutin diperbarui atau diupdate dan dibagikan melalui website SKPD/OPD sehingga jumlah persentase website SKPD/OPD yang aktif pada tahun berikutnya tercapai dan diharapkan semakin naik, dan
13. Menerapkan secara rutin mekanisme *reward and punishment* yang telah ditetapkan oleh Kepala Diskominfotik sehingga seluruh ASN Diskominfotik mendapatkan motivasi dan semangat lebih di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehingga linear dengan capaian kinerja Diskominfotik.

Diharapkan dengan adanya usaha-usaha perbaikan yang terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi, tupoksi, sasaran strategis dan tujuan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh ini, kinerja dan performansi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh dapat terus ditingkatkan setiap tahunnya.

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Semester I Tahun 2025 merupakan dokumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan manajemen strategis pembangunan berbasis kinerja pada Diskominfotik Kota Banda Aceh serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Diskominfotik pada bidang urusan pemerintahan Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam Renstra Diskominfotik tahun 2023-2026 sebagai pendukung pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah (RPD) Kota Banda Aceh tahun 2023-2026.

Secara keseluruhan pelaksanaan dan pencapaian kinerja Diskominfotik Kota Banda Aceh pada Semester I Tahun 2025 masih rendah. Hal ini terlihat pada serapan anggaran perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Diskominfotik pada Semester I Tahun 2025 baru mencapai angka 29,34% dimana total anggaran yang diberikan adalah Rp 22.232.387.455,- dan total realisasi anggaran mencapai Rp 6.524.026.425,-. Terdapat beberapa program, kegiatan atau sub kegiatan Diskominfotik yang telah direncanakan untuk dilakukan berdasarkan Renstra dan Renja Diskominfotik tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir Semester I tahun 2025. Hal ini dikarenakan oleh adanya kebijakan *refocusing* anggaran dan kebijakan Surat Penyediaan Dana (SPD) ketat yang membuat adanya pengalihan anggaran kepada program, kegiatan atau sub kegiatan prioritas.

Langkah-langkah, strategi, dan kebijakan yang bisa diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah menyusun perencanaan kinerja Diskominfotik yang lebih matang dan terpadu yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang dihadapi, melakukan perumusan, penyusunan, penataan, penetapan dan pembakuan kebijakan, rencana induk, Standar Operasional Prosedur (SOP) atau prosedur teknis lainnya yang bisa menunjang tupoksi Diskominfotik, mengalokasikan anggaran dan dana kepada program, kegiatan dan sub kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana kinerja dan hasil yang akan didapat, memaksimalkan anggaran yang diberikan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana TIK yang dimiliki oleh

Diskominfotik, meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga komunikasi lintas sektoral dapat terus terjalin sehingga menjadikan kerjasama SKPD semakin meningkat, meningkatkan dan memaksimalkan kualitas SDM yang dimiliki melalui pelatihan, pendidikan, bimbingan teknis dan pembinaan lainnya, sarana prasarana, profesionalisme, kemampuan dan pemahaman uraian kerja dan seluruh unsur pendukung tupoksi Diskominfotik secara berkesinambungan, melakukan pembinaan dan update data sektoral Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam konsolidasi forum data dan pengelolaan data sektoral, melakukan penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sistem informasi TIK dan informasi publik serta data sektoral yang berkualitas, memperbaiki tingkat kesadaran terkait dengan isu keamanan data dan informasi, melakukan proses pengumpulan, verifikasi dan validasi data sektoral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melakukan perbaikan tata kelola keamanan dan jaring komunikasi sandi.

Demikian LKjIP Diskominfotik Kota Banda Aceh Semester I Tahun 2025 ini kami susun semoga bisa menjadi bahan evaluasi bersama demi peningkatan kinerja instansi dan organisasi serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Kota Banda Aceh.

Banda Aceh, 16 Juni 2025

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH**



**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2025**

Unit Kerja

: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh

No	Sasaran			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan						Ket
	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Kinerja	Target	Uraian	Indikator Kinerja	Target	Uraian	Indikator Kinerja			Satuan	Target	
1											Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	-		
											Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0		
											Hasil	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	%	100		
											Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	-		
											Keluaran	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1		
											Hasil	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	%	100		
											Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	4.855.653.265		
											Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	33		
											Hasil	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	%	100		
											Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	2.094.810.000		
											Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12		
											Hasil	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	%	100		
											Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	201.657.103		
											Keluaran	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	60		
											Hasil	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	%	100		
											Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	5.861.356		
											Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6		
											Hasil	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	%	100		
											Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	-		
											Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1		
											Hasil	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	%	100		
											Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	15.495.747		
											Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	7		
											Hasil	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	%	100		
											Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	100.000.000		
											Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	20		
											Hasil	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	%	100		

					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan (Rp)	-		
							Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3		
								Hasil : Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	%	100		
							Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan (Rp)	-				
							Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	13			
							Hasil : Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	%	100			
							Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan (Rp)	133.319.890				
							Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10			
							Hasil : Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	%	100			
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan (Rp)	698.609.113		
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12		
								Hasil : Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	%	100		
							Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan (Rp)	51.925.330				
							Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12			
								Hasil : Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	%	100		
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan (Rp)	90.487.100		
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4		
								Hasil : Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	%	100		
							Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan (Rp)	-				
							Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	13			
								Hasil : Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	%	100		
							Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan (Rp)	158.126.948				
							Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	58			
								Hasil : Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	%	100		
							Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan (Rp)	30.000.000				
							Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1			
								Hasil : Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	%	100		
												8.435.945.852
2	Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan informasi publik	Persentase website OPD yang aktif	86%	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Terlaksananya Diseminasi Informasi kepada masyarakat	100%	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah yang disampaikan kepada masyarakat				
							100%	Relasi Media	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan (Rp)	688.899.913		
								Keluaran : Jumlah Aktivitas Relasi Media kepada Media yang Memenuhi Kriteria Sebagai Berikut : 1. Terverifikasi Dewan Pers, dan 2. Terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. Aktif dalam Kegiatan Relasi Media	Laporan	5		
								Hasil : Persentase website OPD yang aktif	%	86		
								Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan (Rp)	30.935.900			
								Keluaran : Jumlah Komunitas Informasi yang Aktif Mendiseminasi Informasi dan Terdaftar di Dinas Kominfo	Komunitas	1		
								Hasil : Persentase website OPD yang aktif	%	86		
								Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan (Rp)	60.000.000			

								Pelayanan Informasi Publik	Keluaran	Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Diselesaikan Sesuai Peraturan Perundangan	Permohonan	1	
								Hasil	: Persentase website OPD yang aktif	%	86		
								Masukan	: Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	55.888.307		
								Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik	Keluaran	Jumlah Rekomendasi Komunikasi Terhadap Isu Publik yang Berkembang dan Usulan Agenda Komunikasi Prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi	1	
								Hasil	: Persentase website OPD yang aktif	%	86		
								Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	58.371.382	
								Keluaran	: Jumlah Media Komunikasi Publik Milik Pemerintah Daerah yang Dikelola maupun Pemanfaat Media Berbayar Sesuai Kriteria/Juknis	Media	1		
								Hasil	: Persentase website OPD yang aktif	%	86		
								Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	15.000.000	
								Keluaran	: Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang Disusun	Dokumen	1		
								Hasil	: Persentase website OPD yang aktif	%	86		
								Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	15.000.000	
								Keluaran	: Jumlah ASN Bidang Komunikasi Publik yang Difasilitasi Mengikuti Bimtek/Pelatihan	Orang	45		
								Hasil	: Persentase website OPD yang aktif	%	86		
												924.095.502	
Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	61%	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase terpenuhinya layanan Infrastruktur dan Aplikasi Informatika	100%	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase layanan e-government yang dikelola	100%	Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	46.742.000	
								Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda	Laporan	1		
								Hasil	: Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	%	61		
								Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	38.150.919	
								Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi yang Dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah	Dokumen	1		
								Hasil	: Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	%	61		
								Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang Sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	42.987.367	
								Keluaran	: Jumlah Aplikasi Khusus yang Dibangun dan/atau Dikembangkan Sesuai Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	Aplikasi	3		
								Hasil	: Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	%	61		
								Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	153.115.626	
								Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah di Pemerintah Kab/Kota yang Terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Perangkat Daerah	44		
								Hasil	: Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	%	61		
								Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas Sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	100.000.000	
								Keluaran	: Jumlah Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas Sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Program	1		
								Hasil	: Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	%	61		

Banda Aceh, 17 Februari 2025

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kota Banda Aceh

Kota Bandung

ALIZAR, S.Ag.,M.Hum

Pembina Utama Muda / 19691117 200112 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALIZAR, S.Ag.,M.Hum
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, SE
jabatan : Wali Kota Banda Aceh

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 14 Februari 2025

Pihak Kedua
WALI KOTA BANDA ACEH

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, SE

Pihak Pertama
KEPALA DINAS
KOMUNIKASI,INFORMATIKA DAN
STATISTIK KOTA BANDA ACEH



ALIZAR, S.Ag.,M.Hum
Pembina Utama Muda /
NIP. 19691117 200112 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Tersedianya Data Statistik Sektoral yang Berkualitas dan Terintegrasi	1 Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan Tepat Waktu	Persentase	31
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Teknologi Informasi dan Pengelolaan Informasi Publik	2 Persentase Website OPD yang Aktif 3 Cakupan Layanan E-Government yang Dilaksanakan	Persentase	86 61

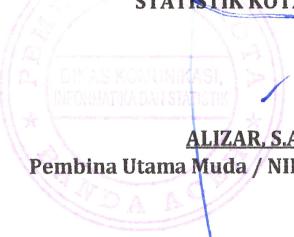
No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.435.945.852	
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	924.095.502	Mendukung Indikator Persentase Website OPD yang Aktif
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	457.199.912	Mendukung Indikator Cakupan Layanan E-Government yang Dilaksanakan
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100.000.000	Mendukung Indikator Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan Tepat Waktu
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	7.076.730	Mendukung Indikator Cakupan Layanan E-Government yang Dilaksanakan
Jumlah		9.924.317.996	

Banda Aceh, 14 Februari 2025

WALI KOTA BANDA ACEH

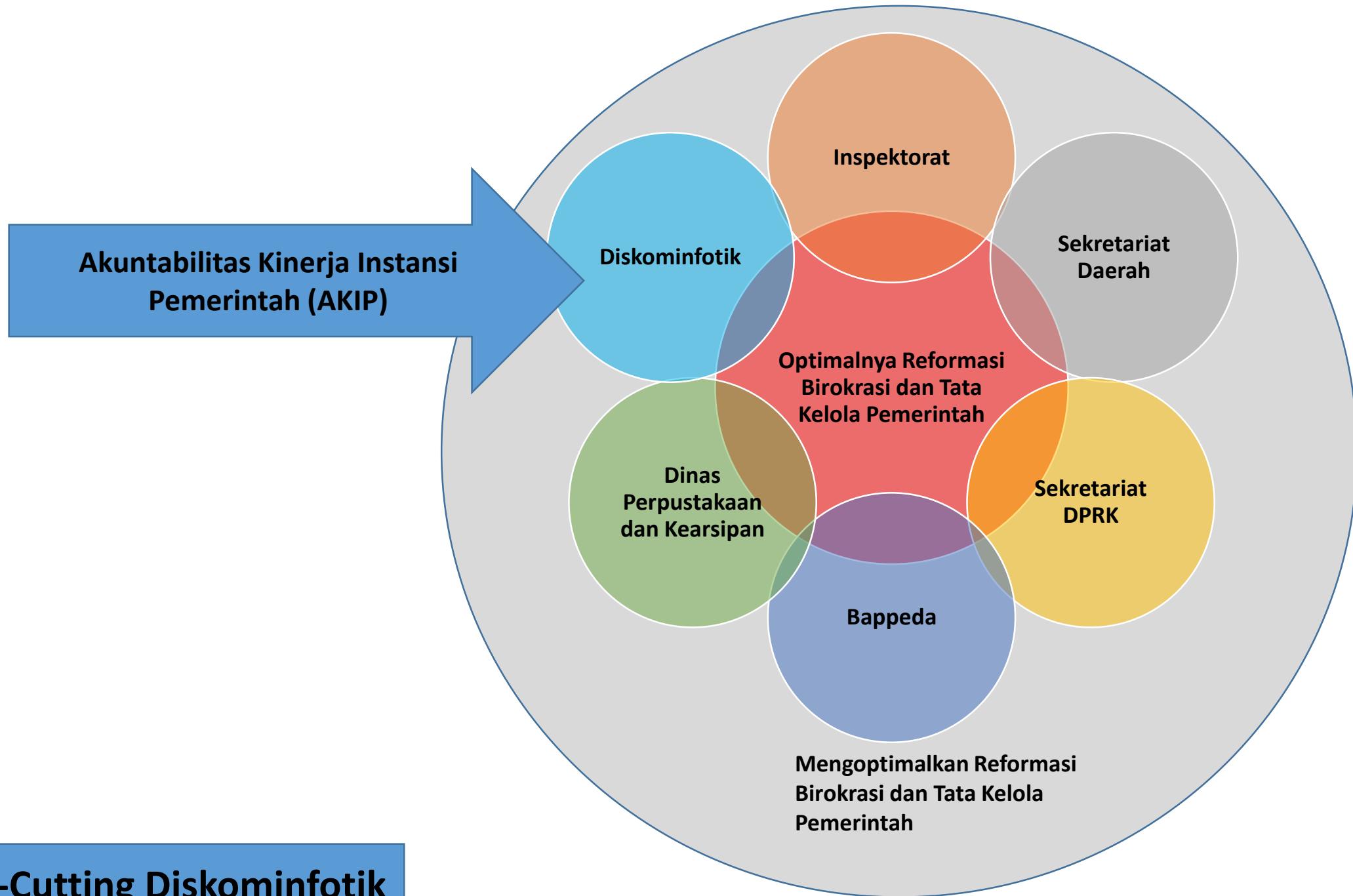

 ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, SE

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH


 ALIZAR, S.Ag., M.Hum
 Pembina Utama Muda / NIP.19691117 200112 1 002

CASCADING KINERJA SASARAN SKPD DISKOMINFOTIK

VISI																		
MISI																		
TUJUAN RPD	Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah																	
SASARAN RPD	Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah																	
IKU RPD	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)																	
TUJUAN SKPD	Tersedianya data dan informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam Kota Banda Aceh																	
INDIKATOR TUJUAN	Percentase data dan informasi Kota Banda Aceh yang berkualitas dan terintegrasi																	
SASARAN SKPD	Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik																	
Indikator Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	Percentase Website OPD yang Aktif						Cakupan Layanan E-Government yang Dilaksanakan											
Program Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik						Program Pengelolaan Aplikasi Informatika											
KEGIATAN Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											
Sub Kegiatan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	Relasi Media	Relasi Media	Relasi Media	Relasi Media	Relasi Media	Relasi Media	Relasi Media	Relasi Media	Relasi Media	Relasi Media	Relasi Media	Relasi Media	Relasi Media	Relasi Media	Relasi Media	Relasi Media	Relasi Media	Relasi Media
Indikator capaian Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	Jumlah Aktivitas Relasi Media kepada Media yang Memenuhi Kriteria Sebagai Berikut : 1. Terverifikasi Dengan Pers. dan 2. Terdapat di Dinas Kominfo dan 3. Aktif dalam Kegiatan Relasi Media	Jumlah Komunikasi yang Aktif Mendiseminasiikan Informasi dan Terdeftari di Dinas Kominfo	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan dan Tata Kelola Komisi, Informasi di Daerah yang Akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dukungan Administratif, Keuangan dan Tata Kelola Komisi, Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Penda	Koordinasi Penarafan Pusat Data Nasional	Koordinasi penyelesaian proses bisnis	Koordinasi penyelesaian SPBE di Lingkungan Penda	Koordinasi penarafan pusat kendali Pemerintah Daerah	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan perencanaan SPBE Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan Daerah	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Audit SPBE atau Kota Cerdas	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Output Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	Laporan	Komunitas	Laporan	Permohonan	Rekomendasi	Percentase	Media	Dokumen	Konten	Orang	Aplikasi	Dokumen	Laporan	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen



Tujuan

Tersedianya data dan Informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam Kota Banda Aceh

Sasaran 1

Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik

Strategi 1

Penyediaan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berkualitas

Strategi 2

Pengembangan kapasitas SDM TIK dan data sektoral

Strategi 3

Melakukan pengembangan sarana dan prasarana sistem informasi dan komunikasi

Strategi 4

Memperbaiki tingkat kesadaran terkait dengan isu keamanan data dan informasi

Strategi 1

Melakukan pembinaan dan update data OPD, melakukan konsolidasi forum data dan pengelolaan data sektoral

Kebijakan 1

Melakukan pengembangan SDM terkait TIK

Kebijakan 2

Melakukan pemeliharaan sistem informasi dan komunikasi publik

Kebijakan 3

Melakukan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana TIK

Kebijakan 4

Melakukan perbaikan tata kelola keamanan dan jaring komunikasi sandi

Kebijakan 5

Perumusan dan penetapan kebijakan, rencana induk dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku

Sasaran 2

Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi

Kebijakan 1

Pengembangan SDM terkait pengolahan data sektoral dengan jalan bimtek dan sosialisasi

Kebijakan 2

Melakukan proses pengumpulan, verifikasi dan validasi data sektoral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Cross-Cutting Diskominfotik

Tujuan

Tersedianya data dan Informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam Kota Banda Aceh

Sasaran 1

Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik

Sasaran 2

Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi

IKU 1

Persentase Website OPD yang Aktif

Program 1

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Kegiatan 1

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

Relasi Media

Sub Kegiatan

Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat

Sub Kegiatan

Pelayanan Informasi Publik

Sub Kegiatan

Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik

Sub Kegiatan

Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Sub Kegiatan

Penyusunan Strategi Komunikasi Publik

Sub Kegiatan

Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik

IKU 2

Cakupan Layanan e-Government yang Dilaksanakan

Program 2

Pengelolaan Aplikasi Informatika

Kegiatan 2

Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda

Sub Kegiatan

Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi

Sub Kegiatan

Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang Sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan

Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota

Sub Kegiatan

Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas Sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas

Sub Kegiatan

Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE

Sub Kegiatan

Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE

Program 3

Program Penyelenggaran Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Kegiatan 3

Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Kegiatan 4

Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

IKU 3

Percentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu

Program 4

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Kegiatan 5

Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi

Sub Kegiatan

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral

Cross-Cutting Diskominfotik

POHON KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH (Revisi Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024)

